



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Utang Kontraktor Wajib Bayar**

**BENGKULU, BE** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih memiliki utang sekitar Rp 87 miliar kepada pihak kontraktor. Utang itu terjadi lantaran ada penambahan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan di akhir 2017 lalu. Rencana pembayaran utang itu akan dilakukan setelah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun ini disahkan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopain Andusti SE MT mengatakan, dasar pembayaran utang itu adalah hasil audit Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK) yang menyatakan utang pemprov menjadi temuan yang wajib dibayar. "Sudah ada hasil audit BPK-nya, jadi itu sebagai utang yang harus dibayarkan," terang Nopian kepada BE, kemarin (29/7). Nopian menegaskan, pembayaran utang itu harus tetap dilakukan. Jika tidak dibayar, maka akan membuat pemprov bermasalah. Untuk itu, pada APBD perubahan nanti, pemprov tetap menganggarkan untuk pembayaran utang tersebut.

► *Baca Utang ...Hal 13*

**Utang** ..... Dari Halaman 3

"Kalau belum bisa dibayarkan, tambah waktu lagi. Tapi pada prinsipnya, kita yang punya utang itu bagaimana bisa cepat diselesaikan," tambahnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Oktaviano ST MSi mengatakan, potensi kerugian negara itu sudah dihitung oleh BPK. Sehingga tidak ada masalah lagi pembayaran utang dilakukan. "Kita yakin ini bisa diselesaikan," tutur Okta. Disampaikannya, pada akhir tahun lalu, ada beberapa titik jalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor. Akhirnya pemprov dan pihak kontraktor bersepakat untuk melakukan adendum 15 hari bekerja. Dengan catatan, anggaran pembangunan itu dibebankan kepada pihak ketiga. Nantinya biaya pembangunan itu akan dibayarkan setelah APBD perubahan tahun ini disahkan. "Itu memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi memang wajib kita bayarkan," tutupnya. Untuk mendapatkan anggaran yang mencapai Rp 87 miliar itu, pemprov berencana memangkas sejumlah anggaran untuk infrastruktur yang belum terlaksana tahun ini. Meski rencana ini mendapat penolakan dari DPRD Provinsi Bengkulu, pemprov bersikukuh memangkas anggaran tersebut karena tidak ada sumber anggaran lain, kecuali dengan memangkas anggaran infrastruktur yang belum dilaksanakan.(151)